BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Harian Manado (Hal. 1) **Kamis, 23 April 2020**

Mendagri Perintahkan Dana NPHD Tak Dikorek

MANADO--Gonjang-ganjing terkait penentuan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang sudah tertunda sejak Maret lalu, kini menemui babak

► Baca **PILKADA**...hal 15

Pilkada... Sambungan Hal 1

baru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyurati seluruh kepala daerah yang menggelar Pilkada. Surat bernomor 270/2931/SS terkait pada intinya menjelaskan soal penundaan Pilkada di tengah pendemik Covid-19.

Dalam surat itu pada salah satu poin Mendagri menegaskan sambil menunggu tindak lanjut kebijakan penundaan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020. "Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya,"kata Mendagri di dalam surat.

Pengamat Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, surat ini mempertegas bahwa Pemerintah tetap akan melaksanakan Pilkada pada Desember 2020. Terutama pada poin 3 ada larangan penggunaan dana hibah Pilkada untuk kegiatan lain.

"Kita positif thingking saja. Jika Pemerintah memaksakan Pilkada pada Desember 2020 berarti telah ada keyakinan dari pemerintah bahwa penyebaran pandemi covid-19 akan berakhir sesuai prediksi yakni 29 Mei 2020. Sebab jika pencoblosan dilakukan Desember maka minggu pertama bulan Juni 2020 sudah harus dimulai dengan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pencocokan serta penelitian daftar pemilih,"kata dosen pascasarjana itu, Rabu kemarin.

Namun Liando berharap jika prediksi Pemerintah ternyata tidak sesuai harapan maka akan paling ideal jika Pilkada ditunda total pelaksanaannya pada 2021. Agar pelaksanaannya berjalan normal mulai dari penyusunan PKPU baru, perencanaan dan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Tentu yang perlu dipersiapkan adalah Perppu karena pasal 201 UU 10 2016 menjelaskan bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2015 menggelar kembali Pilkada pada September 2020.

"Mengapa harus ditunda total karena Beberpa alasan diantaranya kita harus melindungi kesehatan penyelenggara ditingkat ad hoc. Sebab jika tahapan sudah harus dimulai Juni, belum tentu bibit-bibit virus telah punah 100 persen,"ungkap Liando.

Ia menambahkan, perlu waktu pemulihan. Kemudian akan sulit bagi KPUD membuat laporan pertanggungjawaban keuangan jika kegiatannya dilaksanakan di bulan Desember. "Kemudian butuh waktu bagi masyarakat untuk merenung atas apa yang dialami. Jangan sampai Pilkada membuat masyarakat harus konflik dan terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan sehingga tak ada waktu untuk mengevaluasi diri,"tandas peraih doktor di Unpad itu.

Sementara itu, Karo Pemerintahan Pemprov Sulut Dr Jemmy Kumendong menegaskan sudah jelas sekali ini panduan dari Kemendagri, bahwa NPHD tak boleh dialihkan ke kegiatan lain."Jadi kami di daerah akan menurutinya baik pemprov, pemkot dan. Kabupaten tidak boleh mengalokasikan dana hibah Pilkada untuk kegiatan lainnya,"jelasnya. Lanjutnya ,sebelum ada kejelasan resmi soal pilkada dana tersebut tak boleh digunakan."Sampai dengan terbitnya aturan kejelasan pelaksanaan pilkada belum bisa digunakan,"tambahnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menjelaskan bahwa dana pilkada tersebut tetap di rekening KPU. "Kebijakan itu kami sudah lakukan dari 31 Maret. Selain aktivitas laporan, lainnya sudah hold. Tak ada pembelanjaan. Itu untuk pilkada," ujarnya. Diterangkannya lagi bahwa meski dana tersebut tidak dikembalikan, namun belum bisa dipakai juga oleh KPU.

"Kalau penundaan tahapan, kan tak ada kebutuhan. Sebenarnya yang kami perjuangkan untuk tenaga yang direkrut agar dapat jatah. Tapi belum ada respon dari sekjen," ucapnya. Jadi lanjut dia, dana tetap hold. Kalau nanti tahapan mulai lagi, diperhitungkan anggaran kebutuhan berapa, lihat sisa dana berapa, baru diambil untuk dipakai.

"NPHD tak goyang. Kalau anggaran jadi besar, ya bisa ditambah. Dan kami baru ambil beberapa persen dana hibah tersebut. Dan dana hibah pilkada yang itu juga tak bisa dipakai untuk hal lain. Intinya NPHD tak ada pergerakan atau berubah," tegasnya.(**)